



PENELITIAN MANDIRI

**IMPLEMENTASI INTERNATIONAL LABOUR ORGANIZATION
WORK IN FISHING CONVENTION 188 DALAM
MENGATASI PERBUDAKAN MODERN DI SEKTOR INDUSTRI PERIKANAN
STUDI KASUS THAILAND**

Oleh

Asriana Issa Sofia, MA

Program Studi Hubungan Internasional

Universitas Paramadina

2021

LEMBAR PENGESAHAN PENELITIAN MANDIRI

Penelitian dengan judul:

Implementasi ILO Work in Fishing Convention 188 dalam Mengatasi Perbudakan Modern di Sektor Industri Perikanan, Studi Kasus: Thailand

Peneliti:

1. Asriana Issa Sofia

Biaya penelitian : Rp 2.000.000,-

Telah disahkan oleh Direktur Lembaga Penelitian dan Pengabdian Masyarakat dan diketahui oleh Dekan Fakultas Falsafah dan Peradaban Universitas Paramadina, pada:

Hari, Tanggal: Selasa, 7 September 2021

Yang mensahkan dan mengetahui:

**Direktur Lembaga Penelitian dan
Pengabdian Masyarakat**



(DR. Sunaryo)

Dekan Fakultas Falsafah dan Peradaban



(Tia Rahmania, M.Psi., Psikolog)

ABSTRAK

Sektor industri perikanan global cenderung memiliki permasalahan UU dan perbudakan modern (*modern slavery*) terutama terhadap pekerja migran yang bekerja di kapal-kapal penangkap ikan. ILO melalui *Work in Fishing Convention* 188 tahun 2017 menetapkan standar-standar minimum untuk menjamin kelayakan situasi kerja dan kehidupan awak kapal ikan. Namun tren memperlihatkan lambatnya ratifikasi oleh negara-negara anggota. Penelitian ini akan melihat bagaimana Thailand sebagai negara eksportir ikan ke tiha di dunia dan memiliki permasalahan perbudakan modern yang buruk, pada akhirnya memutuskan meratifikasi konvensi, dan bahkan mendapatkan manfaat yang tidak sedikit. Metode penelitian adalah deskriptif analitis. Hasil penelitian menunjukkan bahwa sanksi internasional telah memaksa Thailand untuk lebih serius dan intensif melakukan pemberantasan IUU dan perbudakan modern di sektor industr perikananannya. Komitmen pemerintah Thailand dan reformasi hukum dan tatakelola yang dilakukan pada akhirnya menghasilkan sektor industry perikanan yang lebih bersih, etis, dan diakui secara internasional.

Kata kunci : IUU, ILO, Work in Fishing Convention 188, Thailand

DAFTAR ISI

Lembar Pengesahan

Abstrak

I.Pendahuluan	4
II.Tujuan Penelitian	7
III.Manfaat Penelitian	7
IV.Metode Penelitian.....	7
V. Kerangka Pemikiran	7
VI.Pembahasan	11
VII.Hasil Penelitian	16
VIII.Rekomendasi	17

Daftar Pustaka

I.PENDAHULUAN

Ikan sebagai salah satu sumber protein dan nutrisi menjadikannya sebagai salah satu konsumsi utama masyarakat global. Seiring naiknya jumlah populasi rata-rata 1,6% pertahun, selama tahun 1961-2017 rerata pertumbuhan tahunan total konsumsi ikan juga naik dari 3,16%. Produksi ikan global pada 2018 diperkirakan mencapai 179 juta ton, dimana 156 juta ton dikonsumsi oleh masyarakat dunia. (FAO, 2020) Pengonsumsi ikan terbesar adalah Eropa, Jepang dan Amerika Serikat, juga Asia yang mengonsumsi dua pertiga ikan global apalagi sejak pertumbuhan ekonomi China yang terus naik yang mana konsumsi ikanpun menjadi populer di kalangan masyarakatnya. (Gibbens, 2018). Adapun peningkatan produksi ikan tangkap (*capture fisheries*) global dari 1990-2018 meningkat 14 %. Dimana pada 2018 mencapai tingkat tertinggi sekitar 96.4 juta ton. Tuntutan pemenuhan kebutuhan akan ikan yang sangat tinggi ini menjadikan sektor perikanan (*fishing industri*) menjadi sektor kunci. Sayangnya persentase persediaan ikan (*fish stock*) turun dari 90% di 1974, menjadi tinggal 65% di 2017 (FAO, 2020)

Gambaran di atas memperlihatkan bahwa ikan mengandung aspek *food, trade and employment* (makanan, perdagangan, dan pekerjaan) yang ketiganya perlu dijaga keberlanjutannya. Penekanan mengenai keberlanjutan (*sustainability*) sektor ikan ini dalam Sustainability Development Goals direpresentasikan oleh SDG 8 dan SDG 14. SDG 8 berkenaan dengan pekerjaan yang layak (*decent work*) dan *inclusive growth*, dimana kelayakan pekerjaan di sektor industri perikanan akan mendukung pencapaian SDG 14 yaitu memelihara dan menggunakan secara berkelanjutan samudera, lautan dan sumber-sumber laut. SDG 8.7 menyerukan diambilnya tindakan-tindakan cepat dan efektif untuk menghapuskan tenaga kerja paksa (*forced labour*) dan mengakhiri perbudakan modern (*modern slavery*), perdagangan manusia (*human trafficking*) dan melarang dan menghapuskan bentuk-bentuk terburuk pekerja anak (*child labour*).

Food and Agriculture Organization (FAO) dan International Labour Organization (ILO) adalah dua organisasi Perserikatan Bangsa-Bangsa yang bertugas untuk mengawal pembangunan keberlanjutan di sektor industri perikanan. Peran FAO sebagai organisasi pangan dunia yaitu mempromosikan ikan sebagai makanan sehat sumber protein dan nutrisi yang perlu dikonsumsi, juga tepat untuk mengatasi malnutrisi dan kelaparan. Misi lain FAO adalah bagaimana menjaga

menjaga ketersediaan ikan yang berkelanjutan (*sustainable fish stocks*), dimana penangkapan ikan harus dapat menjamin keberadaan populasi ikan di lautan yang sehat dan produktif), meminimalisir dampak lingkungan khususnya habitat dan spesies-spesies di dalam ekosistem agar tetap sehat), serta manajemen perikanan yang efektif sehingga menjamin semua operasional penangkapan di kelola dengan baik. (Marine Stewardship Council,-) Upaya ini dilakukan FAO melalui strategi kebijakan dan regulasi, membangun kapasitas, layanan dan infrastruktur yang baik, termasuk menjangkau akses ke pasar yang tepat.

Produktivitas yang sangat tinggi dan perdagangan ikan yang potensial, menjadikan sektor perikanan sebagai sektor kunci dan sumber utama pekerjaan. Pada 2018 sekitar 59.5 juta orang bekerja di sektor perikanan, meningkat dari dua tahun sebelumnya. Jumlah ini adalah pekerja di sektor perikanan tangkap (*captured fish*) di kapal-kapal laut, yang lebih banyak daripada jumlah pekerja di sektor budidaya ikan (*aquaculture*). Menurut data pekerja sektor perikanan dunia berdasarkan wilayah, pekerja terbanyak ada di Asia yaitu 30.768 juta, yang merupakan 85% dari total dunia. Pada 2018 total jumlah kapal penangkap ikan di perairan seluruh dunia diperkirakan 4.6 juta, meningkat sebanyak 2,8 % dari tahun 2016. Hal ini merefleksikan tingginya jumlah pekerja di sektor perikanan dimana Asia selalu menjadi yg terbesar dengan 3,1 juta kapal yang merupakan 68% dari total global. (FAO, 2020)

Namun demikian, dibalik dinamika sektor perikanan yang prospektif tersebut sejak lama terjadi praktik perbudakan modern (*modern slavery*) yang dialami oleh pekerja di kapal-kapal penangkap ikan yang didominasi oleh pekerja migran. Banyaknya rekrutmen pekerja migran ini disebabkan kurangnya minat dan penolakan buruh domestik untuk bekerja di kapal-kapal ikan karena menghindari kondisi kerja yang kurang layak di kapal. Disini ILO sebagai organisasi buruh internasional memperkuat perannya untuk menangani manajemen pekerjaan di sektor industri perikanan global.

Perbudakan modern yang terjadi di sektor industri perikanan umumnya adalah perdagangan manusia, tenaga kerja paksa, dan perbudakan anak. Pekerjaan di kapal-kapal penangkap ikan memang memiliki situasi kerja yang sangat unik sekaligus berbahaya. Tidak adanya otoritas pengawas, jangka waktu yang sangat panjang berada di lautan menimbulkan kelelahan, bahaya yang dihadapi tidak didukung oleh jaminan keselamatan kerja anak buah kapal, serta kompleksitas relasi antar pemangku kepentingan di industri

ini.. Karakteristik kerja yang demikian menjadikan para pekerja di kapal ikan berpeluang untuk mendapatkan perlindungan,

Perlindungan terhadap pekerja migran kapal ikan ditangani oleh ILO melalui penetapan Working in Fishing Convention 188 (selanjutnya disebut C.188), yang mengkonsolidasikan konvensi-konvensi sektor perikanan ILO sebelumnya ke dalam satu instrumen – dan dengan demikian merupakan satu-satunya instrumen internasional yang menetapkan standar minimum kelayakan kerja bagi pekerja kapal ikan, serta menetapkan serangkaian tanggungjawab baik bagi pemilik kapal, awak kapal maupun nakhoda untuk memenuhinya, Ikhtisar isi Konvensi dijelaskan dalam sub bab Kerangka Teori.

Diharapkan C.188 ini memperoleh ratifikasi dari negara-negara yang terlibat di sektor industri ikan, namun hingga tahun 2021, dari 187 negara anggota baru 18 negara yang telah meratifikasinya.

Country	Date	Status	Note
Angola	11 Oct 2016	In Force	
Argentina	15 Sep 2011	In Force	
Bosnia and Herzegovina	04 Feb 2010	In Force	
Congo	14 May 2014	In Force	
Denmark	03 Feb 2020	In Force	
Estonia	03 May 2016	In Force	
France	28 Oct 2015	In Force	
Lithuania	16 Nov 2016	In Force	
Morocco	16 May 2013	In Force	
Namibia	20 Sep 2018	In Force	
Netherlands	19 Dec 2019	In Force	
Norway	08 Jan 2016	In Force	
Poland	17 Dec 2019	In Force	
Portugal	26 Nov 2019	In Force	
Senegal	21 Sep 2018	In Force	
South Africa	20 Jun 2013	In Force	
Thailand	30 Jan 2019	In Force	
United Kingdom of Great Britain and Northern Ireland	11 Jan 2019	In Force	

http://ilo.org/dyn/normlex/en/f?p=1000:11300:10147689104804:::P11300_INSTRUMENT_SORT:1

Pergerakan ratifikasi yang lambat ini menunjukkan banyaknya pertimbangan pemerintah negara-negara untuk meratifikasi ILO C.188, meskipun permasalahan tatakelola industri ikan dan perbudakan modern secara umum dialami di negara manapun dan memerlukan penanganan.

Penelitian ini akan difokuskan pada negara Thailand, dikarenakan Thailand merupakan negara pertama di Asia yang meratifikasi Konvensi ILO 188 pada 30 Januari 2019, dan mulai berlaku sejak Januari 2020. Atas komitmennya ini, Dirktur Jenderal ILO Guy Ryder mengapresiasi dan menyatakan bahwa Thailand telah “setting an excellent example” untuk menjamin kondisi kerja dan kehidupan yang baik bagi nelayan di kapal. (The Asean Post, 2019).

II.TUJUAN PENELITIAN

Tujuan dari penelitian ini adalah menjelaskan dinamika Thailand dalam meratifikasi ILO C.188, serta manfaat yang didapatkan Thailand dengan meratifikasi ILO C.188.

III.MANFAAT PENELITIAN

Dari hasil penelitian ini diharapkan dapat :

1. Memberikan penjelasan manfaat-manfaat atau keuntungan-keuntungan yang didapatkan sektor industri perikanan Thailand dari ratifikasi ILO C.188.
2. Dapat menjadi pertimbangan bagi pemerintah Indonesia dan negara-negara yang masih ragu untuk meratifikasi ILO 188.

IV.METODE PENELITIAN

Penelitian ini dilakukan dengan metode penelitian kualitatif yaitu penelitian yang menghasilkan deskripsi dengan mementingkan proses. Untuk mencapai hasil tujuan penelitian diatas, maka proses yang dilakukan bersifat deskriptif analitis. Teknik pengumpulan data berupa studi kepustakaan.

V.KERANGKA PEMIKIRAN

1. Perbudakan modern (*modern slavery*) di sektor industri perikanan

Perbudakan modern yang terjadi di sektor industri perikanan umumnya adalah perdagangan manusia, tenaga kerja paksa, dan perbudakan anak yang masing-masing dapat dijelaskan sebagai berikut. (antislavery, -)

1. Perdagangan manusia (*human trafficking*).

Penggunaan kekerasan, ancaman atau paksaan dalam mengangkut, merekrut atau mendaratkan orang dengan maksud mengeksploitasi mereka untuk tujuan seperti prostitusi paksa, tenaga kerja, kriminalitas, perkawinan atau pengambilan organ tubuh,

1. Pekerja paksa (*forced labour*).

Setiap pekerja yang dipaksa untuk melakukan sesuatu yang bertentangan dengan kehendak mereka dibawah ancaman atau hukuman.

2. Perbudakan anak (*slavery of children*). Anak dieksploitasi demi keuntungan orang lain. Bisa berupa perdagangan anak, perkawinan anak, tentara anak, dan perbudakan domestik anak.

Ewell mengidentifikasi tahapan-tahapan dalam rantai aktivitas dalam industri perikanan dimana terjadi perbudakan modern tersebut, yaitu (Ewell et al, 2017)

a. Tahap persiapan (*preparatory phase*)

Penipuan dokumen, yang dimungkinkan karena sebagian besar berbasis kertas, sering dilakukan oleh perusahaan-perusahaan kapal. Rekrutmen awak kapal juga sering dilakukan secara tidak jujur bahkan dengan kekerasan.

b. Tahap penangkapan (*catching phase*)

Pada tahap ini sering terjadi perdagangan manusia termasuk perdagangan anak (sebagai pengrajin). Selain itu kerap terjadi eksploitasi awak kapal termasuk kekerasan fisik maupun seksual, pemaksaan, penelantaran, kondisi kerja yang menggenaskan, bahkan kadangkala pembunuhan. Selama proses pemindahan muatan juga kerap terjadi pelanggaran atas hak asasi manusia maupun hak buruh. Kapal-kapal yang berlayar di laut berbulan-bulan sampai bertahun-tahun seperti penjara bagi awak kapal, termasuk adanya perlakuan yang tidak benar dan eksploitasi.

c. Tahap penyelesaian pekerjaan (*Work completion phase*)

Lamanya pekerja mendapatkan upah kerja atau atau menerima imbalan yang tidak sesuai.

ILO Work in Fishing Convention 188

Penerapan C 188 ditujukan kepada semua awak kapal dan kapal penangkap ikan yang sifatnya komersial dalam ukuran apapun, dengan penekanan lebih kepada kapal-kapal berukuran panjang lebih dari 24 meter atau berlayar di lautan lebih dari tiga hari (72 jam). Tujuan utama dari ditetapkannya Work in Fishing Convention 188 (ILO 188) adalah memenuhi hak-hak pekerja dari para awak kapal ikan atas kondisi kerja yang layak di kapal-kapal penangkap ikan. Tujuan ini ingin dicapai dengan menetapkan standar minimum (minimum requirements) kondisi kerja awak kapal, yang mana smenjadi tanggungjawab pemilik kapal, awak kapal maupun nakhoda.

Berikut isi C.188 diikhtisarkan dari dokumen lengkap Konvesi.

LINGKUP/ASPEK	KETETAPAN STANDAR MINIMUM
Standar minimum rekrutmen dan penempatan	
Usia bekerja	Usia minimal 16 tahun
	Awak kapal berusia di bawah 18 tahun tidak bekerja di malam hari
	Jenis kegiatan memperhatikan keselamatan, kesehatan dan moral remaja
	Diberikan kompetensi kerja
Kesehatan	Awak kapal memiliki sertifikat medis sah
	Kepastian sehat
Masa istirahat	Awak kapal diberi masa istirahat yang teratur dan cukup
Daftar awak kapal	Ada daftar awak kapal
Perjanjian kerja	Dibuat perjanjian kerja yang ditandatangani awak kapal dan pemilik kapal
	Awak kapal memiliki salinan dokumen
Pemulangan	Awak kapal berhak atas pemulangan (repatriasi) apabila perjanjian kerja sudah berakhir, atau sudah dihentikan atas alasan yang sah

	Biaya pemulangan ditanggung oleh pemilik kapal, mekanisme pulang diatur oleh Negara
Rekrutmen & penempatan	Tidak ada biaya untuk rekrutmen dan penempatan yang dibebankan kepada awak kapal
Upah	Kepastian memperoleh upah bulanan atau upah tetap lainnya.
	sarana mengirimkan uang kepada keluarga tanpa dipungut biaya
Standar minimum kondisi kerja	
Akomodasi dan makanan	Ketersediaan dan kualitas akomodasi, makanan dan air minum
	Kualitas ruang makan dan ruang akomodasi
Pemulangan	Awak kapal berhak atas pemulangan (repatriasi) apabila perjanjian kerja sudah berakhir, atau sudah dihentikan atas alasan yang sah
	Biaya pemulangan ditanggung oleh pemilik kapal, mekanisme pulang diatur oleh Negara
Perlindungan kesehatan	Peralatan medis, orang kesehatan yang kompeten, panduan kesehatan berbahasa awak kapal
	Alat komunikasi untuk bantuan kesehatan dari pihak darat
	Perawatan medis di darat
Keselamatan kerja	Pencegahan kecelakaan kerja, penyakit terkait pekerjaan dan resiko-resiko terkait pekerjaan
	Pelatihan dan pengetahuan awak kapal yang mendukung
Jaminan sosial	Perlindungan jaminan sosial untuk awak kapal tanpa memandang kewarganegaraannya
Perlindungan terhadap penyakit, cedera atau kematian terkait pekerjaan	Diberikan perlindungan terkait

Dalam Konvensi disebutkan kewajiban negara peratifikasi untuk menerapkan undang-undang, peraturan,, atau tindakan-tindakan lain yang mengatur hal-hal tersebut diatas.termasuk memperjelas posisi perwakilan organisasi pemilik kapal penangkap ikan dan awak kapal. Kemajuan penerapan tersebut kemudian wajib dilaporkan kepada ILO. Dalam prosesnya,negara dapat melakukan konsultasi jika mengalami kendala dalam penerapan Konvensi.

VI. PEMBAHASAN

Sub bab ini akan menjelaskan bagaimana Thailand sebagai negara Asia pelopor yang meratifikasi C.188 mengalami kondisi-kondisi yang mendorongnya untuk memutuskan hal tersebut, serta sejauh ini dalam hal apa saja Thailand telah membuat kemajuan khususnya dalam menangani perbudakan modern di sektor industri perikananannya.

Sektor industri perikanan Thailand dan permasalahannya

Thailand merupakan negara eksportir *seafood* dan ikan yang terbesar ke tiga di dunia, menguasai 8% dari total ekspor dunia. Sektor perikanan menyumbang persentase GDP bagi ekonomi Thailand dan merupakan sumber kehidupan sekitar 2 juta orang yang bekerja di sektor ini, (Thailand Department of Fisheries, 2020). Di sektor ini terlibat sekitar 220.000 pekerja migran, 71.000 orang diantaranya bekerja di kapal-kapal laut. (Justice for Fishers, 2018) Tuntutan produksi yang tinggi justru memunculkan eksploitasi berlebihan (*over exploited fishing*) dan praktik illegal, unreported and unregulated (IUU) fishing yang sistematis, serta pelanggaran hak asasi manusia.

Permasalahan terkait pekerja kapal ikan Thailand dapat diidentifikasi sebagai berikut.

1. Forced labour

Setengah dari 600.000an pekerja di sektor industri perikanan Thailand adalah migran berasal dari Myanmar, Kamboja dan Laos yang tidak memiliki dokumen (*undocumented*). Demi mengejar kebutuhan stok ikan Thailand, kapal-kapal ikan berlayar lebih lama di lautan sehingga menggunakan jaringan perdagangan manusia mereka guna mendapatkan buruh paksa atau budak untuk menjalankan kapal dengan hemat biaya. Para awak kapal ini pun rentan mengalami kekerasan dan pelanggaran HAM. United Nations (UN) Report menemukan bahwa 59% migran diperdagangkan/diselundupkan di kapal-kapal ikan Thailand, dan menyaksikan pembunuhan sesama pekerja (The Asean Post, 2019). Pekerja migran mudah diperdaya pemilik kapal disebabkan rendahnya pendidikan, kurangnya pengetahuan, dan ketidakmampuan berkomunikasi dengan pihak otoritas karena kendala bahasa (Chotepanitses, 2019)

2. *Child labour*

Fenomena pekerja anak (*child labour*) juga terjadi di sektor perikanan Thailand. Dari hasil survey tahun 2018 terhadap pekerja anak, yang dilaksanakan dengan standar internasional berkoordinasi dengan ILO, terdapat temuan yaitu sekitar 177.000 anak terlibat dalam pekerjaan, yang mana 133.000 anak melakukan pekerjaan berbahaya diantaranya di sektor penangkapan ikan, termasuk bekerja di kapal-kapal laut, yang merupakan salah satu bentuk terburuk dari pekerja anak, dan pasti terkait dengan perdagangan manusia (*human trafficking*). (U.S Department of Labour, 2019).

Di sisi lain, korupsi, praktik-praktik penangkapan ikan yang buruk yang sudah lama dilakukan, serta resistensi asosiasi nelayan di Thailand yang merasa bahwa C.188 “terlalu kaku dan tidak cocok dengan kondisi lokal” memperburuk situasi sektor industri perikanan negara ini dan menjadi tantangan besar pemerintah Thailand dalam proses menuju ratifikasi C.188 (The AseanPost, 2018) . Korupsi di industri ini membuat polisi, pemimpin komunitas, pengusaha dan politisi semuanya tutup mata atas apa yang terjadi di lautan. (The Asean Post, 2019)

Upaya domestik dan dampak internasional

Dalam membasmi praktik IUU dan perbudakan modern pemerintah Thailand sudah melakukan upaya serius dan intensif sejak tahun 2014 dengan mengadopsi konvensi dan membuat regulasi-regulasi. Diantaranya adalah Ministerial Regulation on Protection of Workers di sektor perikanan laut pada Desember 2014 hasil kerjasama teknis antara Ministry of Labour dan ILO, juga pembentukan Command Cente for Combatting Illegal Fishing (CCI) sebagai pusat khusus untuk menangani permasalahan IUU pada April 2015. (ILO , -) .

Perhatian internasional yang terus menyoroiti kinerja pemerintah Thailand melihat persoalan IUU yang tidak kunjung selesai, dan menilai kurangnya komitmen Thailand. Akhirnya muncul tekanan internasional yang diterima Thailand, yaitu (Chotepanitses, 2019) (Thailand Work in fishing convention, 2007 Thailand as a cese study, by Decha Chotepanitses, 2019)

1. Menjadi obyek pantauan FAO terkait permasalahan IUU, dan *fish stock reservation* sempat menjadi pembahasan di FAO.
2. Amerika Serikat menurunkan Thailand dari posisi Tier 2 dalam pemberantasan perdagangan manusia ke posisi Tier 3.
3. Komisi Eropa memberikan *yellow card* sebagai peringatan resmi kepada Thailand pada April 2015 karena Thailand dianggap kurang serius memperbaiki IUU fishing oleh industri penangkapan ikan Thailand.

Sanksi-sanksi ini tentu sangat berdampak negatif bagi Thailand. Prestise Thailand sebagai negara eksportir unggulan untuk makanan laut dan ikan menjadi tergradasi dimata masyarakat internasional, yang jika dibiarkan akan dapat memunculkan dampak lanjutan penurunan eksportnya.

Situasi ini segera direspon oleh pemerintah Thailand dengan mengerahkan beberapa upaya besar untuk perbaikan, antara lain,

- Menyusun *road map for eliminating IUU fishing*
- Memperkuat hukum dan kebijakan - salah satunya Royal Ordinance on Fisheries pada November 2015.
- Ministry of Labour dimandatkan khusus merancang tindakan-tindakan untuk memperbaiki kondisi kerja dan secara progresif mencegah bentuk-bentuk pekerjaan yang tak dapat diterima termasuk *forced labour* dan *child labour*. (Justice for Fishers, 2018).
- Meratifikasi Protocol 2014 of the Forced Labour Convention pada 2018.
- Meratifikasi ILO Work in Fishing Convention 2007 pada 30 Januari 2019.
- Meratifikasi 2019 Work in Fishing Act 2019
- Meratifikasi 2019 Fishery Workers Protection Act, dan merancang regulasi-regulasi di sektor perikanan yang beresiko tinggi.

Dukungan ILO untuk Thailand dalam proses menuju ratifikasi C.188

Ratifikasi terhadap C.188 akan mewajibkan Thailand untuk implementasikan Konvensi ke dalam perundangan nasional. Thailand tidak sendiri berjuang untuk mewujudkan komitmen itu, namun didukung oleh ILO dalam melalui bantuan teknis yaitu dilakukannya Gap Analysis Study oleh ILO pusat bersama-sama ILO Asia Regional Office dan tim Ship to Shore Project yang didanai EU untuk mengidentifikasi kesenjangan antara hukum/aturan dan praktik yang sudah ada di Thailand dengan pemenuhan standar dalam pasal-pasal Konvensi. Hasil studi menemukan beberapa kesenjangan, secara garis besar antara lain (ILO,-)

- Hukum Thailand memiliki sejumlah definisi yang berbeda dengan C.188.
- Terdapat sejumlah regulasi yang sudah merefleksikan beberapa pasal C.188, tetapi tersebar dan tumpang tindih karena dikelola oleh badan pemerintah yang berbeda-beda. Misalnya regulasi perlindungan tenaga kerja oleh Ministry of Labour, regulasi kapal ikan dan perlengkapannya oleh Department of Fishery, Ministry of Agriculture and Cooperation, regulasi keamanan kapal dan kualifikasi nelayan oleh Marine Department, Ministry of Transportation.
- Aplikasi setiap regulasi tersebut ditujukan hanya kepada sebagian subyek dari yang ditetapkan dalam C.188. Misalnya regulasi hanya diterapkan untuk kapal-kapal bermuatan besar sehingga tidak menjangkau kapal=kapal kecil.
- Namun demikian regulasi Thailand terkait upah minimum dan pengaturan waktu istirahat memiliki standar yang lebih tinggi dari C.188.
- Terdapat juga hal-hal yang sudah sama diatur di C.188 namun belum sepenuhnya sesuai. Misalnya akomodasi dan toilet wajib disediakan hanya untuk ukuran kapal besar tertentu.
- Regulasi Thailand terkait kesehatan dan keamanan kerja tidak jelas penerapannya dalam konteks sektor perikanan.
- Ada pasal C.188 yang sudah dilakukan oleh Thailand namun belum dirumuskan regulasinya. Misalnya jaminan sosial.
- Hal-hal yang memang belum dilakukan oleh pemerintah Thailand.

Dari hasil tersebut sejumlah rekomendasi diajukan agar Thailand pasca ratifikasi C-188 merumuskan regulasi-regulasi baru sesuai standar Konvensi, dengan pengaturan yang atas peran dan tanggungjawab setiap badan pemerintahan, termasuk peran dan kapasitas Angkatan Laut Thailand untuk melaksanakan inspeksi di laut. Hukum dan regulasi Thailand didorong untuk disesuaikan dengan standar C.188 tanpa merubah sejumlah regulasi yang sudah ada.

Bersama dorongan berbagai kalangan seperti LSM dan lembaga advokasi di dalam negeri Thailand sendiri, hasil studi ini berkontribusi besar pada keputusan pemerintah Thailand untuk meratifikasi Fishing Convention, 2007 (No.188).

Langkah Thailand dalam penerapan C.188 dan manfaat yang diperoleh

Pasca ratifikasi C,188 sejumlah langkah maju telah dilakukan oleh pemerintah Thailand, diantaranya ,

1. Menetapkan undang-undang nasional untuk mengimplementasikan C.188 dan diturunkan ke dalam sejumlah aturan perundangan.
2. Melalui Work in Fishing Act 2019, mewajibkan pihak-pihak berwenang di semua aspek perlindungan awak kapal untuk merubah aturan-aturan lain yang ada, dan merumuskan perundang-undangan tambahan menyesuaikan dengan 2019 Act.
3. Melakukan amandemen terkait pekerja paksa dalam Thai Anti-Trafficking Act
4. Pada bulan maret 2021, sejumlah asosiasi industri di Thailandi menandatangani pakta untuk memotong rantai pekerja anak dan pekerja paksa. (The Borgen Project, -)
5. Untuk menghapuskan praktik buruk pekerja anak, pada 2019 pemerintah Thailand meningkatkan jumlah inspeksi pekerja hingga 6 %.
6. Dan tindakan-tindakan lainnya yang dilakukan dari 2015 (sejak adanya sanksi US dan EU) hingga 2018 (sebelum ratifikasi C.188)

Komitmen dan upaya-upaya Thailand untuk membasmi IUU melalui kepatuhan terhadap C-188 dan juga tindakan-tindakan sebelum ratifikasi, menghasilkan perbaikan situasi yang signifikan pada sektor industri perikanan Thailand, dan juga pengakuan internasional atas usaha luarbiasa tersebut. Beberapa hasil atau manfaat yang diperoleh Thailand diantaranya,

1. European Commission melepaskan Thailand dari daftar negara-negara yang diperingatkan setelah menurut EU sudah menunjukkan kemajuan yang signifikan pada industri perikanan Thai serta meratifikasi C.188.
2. Thailand dipromosikan dari posisi tier 2 *watch list* ke tier 2 dalam US State Department's Trafficking in Persons (TIPs) 2018 report.
3. Pemerintah Thailand mengklaim bahwa hukum atau regulasi yang ada sudah 80% selaras dengan C.188. Pemerintah Thailand akan terus memenuhi yang 20% dengan reglasi-regulasi baru, dan menjamin implementasi yang sesuai dengan Konvensi.
4. Pemerintah Thailand menyatakan “IUU-Free Thailand”, yang artinya ikan dan produk-produk ikan yang diimpor dari dan diekspor dari Thailand (tidak hanya ke EU tetapi juga negara-negara non EU di seluruh dunia) tidak berasal dari kegiatan-kegiatan IUU dan bahwa produk-produk IUU tidak masuk ke dalam rantai suplai mereka. (Department of Fisheries Thailand, 2020).

VII.HASIL PENELITIAN

Thailand secara historis merupakan salah satu negara eksportir *seafood* dan ikan besar di dunia, dan pada saat yang sama dikecam secara internasional atas persoalan praktik IUU dan perbudakan modern yang terjadi di sektor industri perikananannya. Pemerintah Thailand sebenarnya cukup serius dan intensif melakukan reformasi hukum atas dorongan pihak-pihak seperti LSM, namun masih kuatnya resistensi pihak pengusaha dan pemilik kapal ikan, serta pembiaran oleh otoritas lainnya, maka implementasi di lapangan tidak cukup efektif. Pada akhirnya, sanksi internasional terutama dari Amerika Serikat dan European Commission yang berdampak pada citra buruk Thailand mampu memaksa pemerintah untuk lebih agresif melancarkan reformasi di internal maupun internasional, salah satunya dengan meratifikasi Konvensi ILO C.188. Dukungan dan pendampingan ILO sangat membantu Thailand untuk lebih percaya diri dalam keputusannya meratifikasi C.188 dan melakukan banyak penyesuaian hukum dan mengawal implementasinya di lapangan. Oleh karena selama tahun-tahun sebelum ratifikasi C.188 Thailand sudah melakukan Langkah-langkah awal reformasi, maka tidak memerlukan waktu lama pasca ratifikasi C.188 untuk mencapai hasil yang diharapkan. Pada akhirnya semua upaya Thailand diakui secara internasional dan mengembalikan reputasi Thailand.

VIII.REKOMENDASI

Dari hasil penelitian ini, menyarankan agar negara-negara anggota ILO terutama Indonesia, untuk belajar dari pengalaman Thailand. Tidak perlu menunggu sanksi internasional dijatuhkan, namun atas dasar kewajiban internasional dan menjunjung tinggi HAM maka direkomendasikan untuk segera meratifikasi ILO Working Fishing Convention 188, sebagai pedoman dalam pemenuhan HAM (pekerja sektor ikan) dan tata kelola yang baik (*good governance*) sektor industri perikanan.

DAFTAR PUSTAKA

Antislavery.org, What is Modern Slavery ?

<https://www.antislavery.org/slavery-today/modern-slavery/>

Chotepanitses, Decha, Work in Fishing Convention, 2007:Thailand as a case study, 2019

https://commons.wmu.se/all_dissertations/1149/

Department of Fisheries Thai, Thailand's Success in Combating IUU Fishing, 2020

https://www4.fisheries.go.th/dof_en/view_message/232

Ewel, Cristopher,et.al, Potential Ecological and Social Benefits of a Moratorium on Transshipment on the High Sea, Marine Policy, 2017

Food and Agriculture Organizations, The State of World Fisheries and Agriculture 2020,

<http://www.fao.org/state-of-fisheries-aquaculture>

Gibbens, Sarah , Can the Ocean Feed a Growing World? , National Geographic, Agustus 2018

<https://www.nationalgeographic.com/environment/article/news-fisheries-aquaculture-food-security>

ILO Work in Fishing Convention (C188), Instrumen Khusus Perlindungan Awak Kapal, Jurnal Maritim, 14 September 2020

<https://jurnalmaritim.com/ilo-work-in-fishing-convention-c188-instrumen-khusus-perlindungan-awak-kapal-ikan/>

ILO, DRAFT Gap analysis of the Work in Fishing Convention, 2007 (No. 188), and Thai national laws, regulations and other measures concerning conditions of work on board fishing vessels

https://www.ilo.org/wcmsp5/groups/public/---asia/---ro-bangkok/documents/publication/wcms_557738.pdf

Justice for Fishers, NGOs Speak out for Fishers, September 21, 2018

<https://justiceforfishers.org/joint-civil-society-statement-on-ratification-of-the-work-in-fishing-convention/>

Marine Stewardship Council , What is Sustainable Fishing?

<https://www.msc.org/what-we-are-doing/our-approach/what-is-sustainable-fishing>

Ratifications of C188 - Work in Fishing Convention, 2007 (No. 188)

http://ilo.org/dyn/normlex/en/f?p=NORMLEXPUB:11300:0::NO::P11300_INSTRUMENT_ID:312333

The ASEAN Post, Thailand struggle with fisheries management, February 6, 2019

<https://theaseanpost.com/geopolitics>

The ASEAN Post, Protecting Rights of Fishermen, August 4, 2018

<https://theaseanpost.com/article/protecting-rights-fishermen>

The Borgen Project, Ending slavery in Thai Fishing Industry

<https://borgenproject.org/slavery-in-the-thai-fishing-industry/>

U.S Department of Labour, Child Labor and Forced Labor Reports Thailand, 2019

<https://www.dol.gov/agencies/ilab/resources/reports/child-labor/thailand>